

## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018)

Moch. Razy Fatahilah  
Universitas Hang Tuah Surabaya

### **Abstract**

*This study analyzes the community political participation in East Java regional election. It aims to understand the affecting factors on the community political participation in Surabaya. The theory uses political participation. There are five indicators that influence political participation, such as social and economic status, parents' affiliation, experience to organize, political awareness and confidence in the government. The research method is a qualitative descriptive method. data collection techniques are obtained through interview and documentation. The results indicate that the factors have greater influence on participation in social status and economics, and parents' affiliation. Thus, it needs an urban village general election commission or educate for the residents who live in the urban village. Furthermore, the community work and the role of family in understanding the knowledge of politics have less supportive affiliation.*

**Keywords:** *Political Participation, Election of Regional*

### **I. PENDAHULUAN**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka masing-masing. Demokrasi membuat warga negara Indonesia berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Perkembangan paradigma administrasi negara dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, krisis akademis terjadi beberapa kali sebagaimana terlihat dari pergantian paradigma yang lama dengan yang baru. Nicholas Henry melihat perubahan paradigma ditinjau dari pergeseran lokus dan fokus suatu disiplin ilmu.

Hasil paradigma ini memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik. Masalah partisipasi politik atau partisipasi masyarakat ini juga tidak bisa lepas dari paradigma karena partisipasi masyarakat juga sangat dekat sekali dengan kajian-kajian tentang politik. Dalam persoalan administrasi publik ini juga tidak bisa terlepas dari masalah politik, contohnya yaitu persoalan tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pada Pasal 14 huruf C yang berbunyi "Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat" menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat berperan atau berpengaruh sangat penting untuk berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat

penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena ini wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Makna arti kata diatas bahwa kekuasaan tertinggi sebenarnya yaitu dari rakyatnya sendiri karena pejabat publik atau seorang Presiden pun yang menentukan adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak memilih sosok pemimpin manakah yang cocok atau sanggup untuk memimpin negara ini berdasarkan persepsi mereka sendiri-sendiri. Jadi yang pada intinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara adalah rakyat.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 2 tahun 2017 menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengikuti atau berpartisipasi didalam Pilkada untuk memilih siapakah pemimpin yang mereka inginkan untuk memimpin daerahnya, dijelaskan lagi bahwa pada bab II pasal 5 ayat 2 huruf D dan E yang berisi “D. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”; “E. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf D, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat”. dan pada peraturan tersebut ada beberapa persyaratan yang ditentukan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya, yaitu:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Jadi dari ketiga fungsi diatas maksudnya ialah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut masyarakat di daerah dapat menyimpulkan apakah akan memilih pejabat publik yang

sama atau memilih pejabat publik lain yang bisa memimpin daerahnya untuk lebih profesional dan mendapatkan keberhasilan memimpin daerahnya kedepan, apakah organisasi politik mereka masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara demokratis sehingga nantinya betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Tak terkecuali dari kasus yang sangat meresahkan masyarakat yaitu adanya pelanggaran dan kelemahan yang dapat merusak demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus diperbaiki dan dicegah.

Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokrasi adalah adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang secara aktif ikut kedalam berjalannya tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hal yang sangat penting. Menurut Ramlan Surbakti (2010) menyebutkan dua faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama* dari lingkungan langsung yaitu, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). *Kedua*, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor lain yaitu dari lingkungan tidak langsung yaitu, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Dari hasil data KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Surabaya yang dilihat tingkat per Kecamatan keseluruhan yang paling tinggi yaitu Kecamatan Pakal dengan 67% dan yang paling rendah di Kecamatan Semampir dengan 44% dan dari hasil data KPU dan PPS menunjukkan bahwa tingkat partisipasi per Kelurahan yang ada di Kecamatan Semampir Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kelurahan Ujung memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu 37% diantara Kelurahan lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018 dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018 dan Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2005: 20). Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan

difokuskan pada “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Jawa Timur 2018” yang objek utamanya merupakan masyarakat atau dilihat dari segi individu bukan kelompok yang ada di Kelurahan Ujung.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan (Moleong, 2005:58). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Subyek penelitian menurut Sugiyono (2011: 301) kriteria yang dimaksud untuk menentukan subyek penelitian, yakni orang-orang yang karena posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan masalah yang diteliti mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang memenuhi kriteria. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yang memberikan data-data mengenai tingkat partisipasi politik untuk mendukung hasil penelitian penulis yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya di bagian Kepala Subbag Teknis Pemilu Dan Hupmas. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah staf Kelurahan Ujung, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua RT, Pengurus Kartar, Ibu-Ibu Pengajian, Ibu-Ibu PKK dan masyarakat di Kelurahan Ujung yang dimana nanti akan diambil menggunakan Snowball dan Purposive di Kelurahan Ujung yang memenuhi kriteria untuk dijadikan informan yang terkait dengan kurangnya tingkat partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari informan tersebut akan diteliti lebih dalam untuk mengenai informasi terkait partisipasinya didalam Pilkada dan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada atau tidak ikut berpartisipasi dari segi individu seseorang.

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Display data, (4) Verifikasi dan Penegasan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap indikator status sosial dan ekonomi yaitu sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka, karena jika dilihat dari segi pendidikan sangat berpengaruh besar untuk tingkat partisipasi politik mereka itu sebabkan bahwa seseorang yang lulusan SMA sampai Perguruan Tinggi kebanyakan dari mereka tingkat partisipasinya tinggi dan peka terhadap lingkungan sekitar dan seseorang yang tingkat lulusannya SD kebanyakan dari mereka tingkat partisipasinya sangat kurang dan sedikit apatis dan tidak mau tahu apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Dan jika dilihat dari pekerjaan kebanyakan dari mereka bahwa seseorang yang bekerja sebagai guru/dosen atau pegawai yang ada di BUMN/BUMD kebanyakan dari mereka peka dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dan lingkungan yang memang menunjang untuk meningkatkan partisipasi politik mereka dan dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja atau bekerja sebagai wiraswasta kebanyakan dari mereka kurang peka dan kurang

memahami dan lingkungan pekerjaan mereka juga tidak seberapa menunjang mereka untuk ikut berpartisipasi politik.

Analisis terhadap indikator afiliasi orang tua yaitu sangat mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik, karena afiliasi orang tua bisa menjadikan seseorang tahu bahwa pentingnya berpartisipasi politik, tetapi disini afiliasi orang tua terhadap anak atau keluarganya dari apa yang sudah ditemukan dilapangan bahwa orang tua masih kebanyakan mengafiliasikan ke anak atau keluarganya dengan partai-partai lama, ini disebabkan memang orang tua masih percaya dengan apa yang sudah dilakukan pejabat pemerintahan yang sampai sekarang masih aktif di partai lama, itu mengapa bahwa orang tua masih mengafiliasi ke anak atau keluarga mereka dengan partai lama, tetapi disini beberapa dari mereka yang penulis sudah melakukan wawancara kebanyakan mereka masih dengan pendirian mereka pilihan mereka dan kemauan mereka untuk berpartisipasi atau tidak.

Analisis terhadap indikator pengalaman organisasi yaitu sangatlah berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam berpartisipasi politik, karena jika seseorang mengikuti organisasi dan tidak ikut organisasi bisa membuktikan bahwa yang tidak ikut organisasi kebanyakan dari mereka tidak mau tahu tentang adanya politik sehingga apa yang dia lakukan semuanya hanya pasrah dengan keadaan yang dialaminya seperti sekarang ini dengan pejabat pemerintahan yang sekarang lagi menjalankan tugas, beda dengan orang yang mengikuti organisasi mengatakan bahwa mereka peka terhadap politik mereka tahu bahwa keikutsertaan mereka dalam berpartisipasi politik sangatlah penting dalam kemajuan Indonesia, bisa dilihat bahwa dalam mengikuti organisasi banyak dilakukan sharing, dialog antar sesama dan bisa memperluas wawasan pengetahuan mereka yang didapat setelah mengikuti organisasi.

Analisis terhadap indikator kesadaran politik yaitu sebenarnya sudah tinggi mereka sudah paham dan mengerti bahwa akan hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi politik untuk Negara Indonesia ini, tetapi di sisi lain banyak juga pengaruh-pengaruh atau ajakan dari orang lain untuk ikut berpartisipasi, tetapi jika itu ada pengaruh atau ajakan dari orang lain maka tidak bisa dikatakan bahwa mereka mempunyai kesadaran untuk berpolitik, yang dimaksud kesadaran disini yaitu masyarakat harus timbul dari dalam hatinya sendiri akan hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi politik, dan disini warga yang berada di Kelurahan Ujung kebanyakan dari mereka yaitu sudah mempunyai kesadaran akan hak mereka untuk ikut partisipasi tetapi banyak juga yang mengalami pengaruh dari orang lain seperti ajakan memilih di salah satu pasangan calon tetapi kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan itu dan mereka sadar dari dalam diri sendiri akan hak mereka dalam berpartisipasi.

Analisis terhadap indikator kepercayaan terhadap pemerintah yaitu bahwa seseorang terhadap kinerja pemerintah sangatlah berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi mereka untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena dalam hal ini masyarakat seluruhnya menyerahkan ke pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat dan program pemerintah lainnya yang sebagaimana untuk masyarakat bisa hidup enak atau nyaman di Negara Indonesia, karena kalau pemerintah sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat di pemerintahan dan kinerja dari mereka yang sudah dijanjikan kepada masyarakat tidak dilaksanakan atau kurang maksimal maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat itu akan semakin lama semakin hilang karena mereka kecewa dengan apa yang pejabat itu lakukan karena masyarakat sudah mempercayai mereka.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018. Penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu dari lingkungan tidak langsung yang meliputi status sosial ekonomi dan afiliasi orang tua, dari status sosial ekonomi dilihat dari bidang pendidikan bahwa seorang pemilih yang lulusannya mencapai SD-SMA minimnya pengetahuan tentang politik dan menyebabkan golput, sedangkan dari afiliasi orang tua juga sangat berpengaruh seorang pemilih yang kurang komunikasinya dengan orang tua atau keluarga kebanyakan dari mereka memilih golput karena minimnya pengetahuan tentang apa yang akan mereka pilih berbeda dengan seorang pemilih yang komunikasinya baik dengan orang tua mereka tau yang akan mereka lakukan dan turut berpartisipasi.

Dari hasil simpulan diatas saran dari penulis yaitu untuk instansi pemerintahan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan juga Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir bersama-sama lebih menyeluruh untuk melakukan sosialisasi, pemberitahuan, wawasan kepada warga supaya mereka mempunyai rasa kepekaan terhadap apa yang terjadi di Indonesia.
2. Kelurahan Ujung juga bisa memberikan edukasi tentang politik kepada warga bisa lewat organisasi kartar atau juga dari yang biasa dilakukan Ibu-Ibu pengajian dan PKK karena itu bisa membantu masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi.

Sedangkan saran penulis bagi masyarakat Kelurahan Ujung yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Ujung harus peka terhadap keadaan atau lingkungan yang terjadi di sekitar mereka, tidak mengenal pendidikan, pekerjaan dan dari mana latar belakang keluarga mereka karena kita sebagai warga negara yang baik harus peka terhadap apa yang terjadi di negara Indonesia
2. Orang tua atau keluarga harus selalu rutin berkomunikasi, sharing dan berbagi pengalaman kepada anaknya terkait dengan adanya partisipasi politik, karena berawal dari keluarga bisa menambah pengetahuan mereka tentang politik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. 1960. *The Politics Of The Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press
- Bawono, Muhammad. 2008. "Persepsi dan Perilaku Memilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk". *Jurnal m'power* No.8 Vol.8, Oktober 2008.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Cholisin, et.al. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Milbrath, L., & Goel, M. L. 1997. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teoriteori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo